

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkah dan karunianya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap keseluruhan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber dan kebijaksanaan. Selain itu, penyusunan LAKIP ini berdasarkan evaluasi dan analisa capaian kinerja kegiatan dengan sasaran dan mengacu pada Rencana Strategis 2023 – 2026 dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tahun 2023 merupakan tahun pertama dalam Periode Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur, Tujuan dari penyusunan LAKIP ini adalah melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan program kerja yang diselenggarakan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan dan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta dalam rangka menyampaikan hasil evaluasi dan analisis realisasi kinerja kegiatan dari pelaksanaan kebijakan dan program.

LAKIP ini dapat menjadi panduan bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur untuk meningkatkan kinerja organisasi sesuai dengan tujuan, sasaran, program, dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur ini, segala masukan, kritikan dan usul saran sangat kami harapkan demi penyempurnaan laporan ini. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan bahan masukan dan partisipasi aktif dalam penyusunan laporan ini.

Larantuka, Januari 2024

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian  
Kabupaten Flores Timur,

**Siprianus Sina Ritan, Sos, Msi**

Pembina Utama Muda

Nip.197012311999031056

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1 Latar belakang**

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur yang pelaksanaannya dengan Peraturan Bupati Nomor 84 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur yang telah dirubah dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 67 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur, mempunyai tugas pokok membantu Bupati Flores Timur dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang Perdagangan dan Perindustrian. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur dituntut untuk melaksanakan dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance sebagaimana dimaksud dalam Undang undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan tugas tugas dan Fungsi selama tahun 2023 dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan sekaligus sebagai alat kendali untuk memacu meningkatkan kinerja di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur.

Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan tentang Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian selama tahun 2023, yang hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program dan kegiatan ditahun berikutnya.

## I.2 Landasan Hukum

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perdagangan Kabupaten Flores Timur tahun 2023 dengan memperhatikan peraturan perundang undangan yang melandasi pelaksanaan LAKIP, yaitu :

1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan Nepotisme;
2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
3. Undang undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah
4. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan pemerintah antara
7. Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Tahun 2005 – 2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 Nomor 10, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0150)

13. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 37 tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah kabupaten Flores Timur,
14. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur.
15. Peraturan Bupati Flores Timur 17 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur
16. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur TA 2023
18. Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur Tahun 2023;

### **I.3 Gambaran Organisasi**

Dinas Perdagangan dan Perindustrian dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah, yang pelaksanaannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 84 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur yang telah dirubah dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 67 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur, memiliki Tugas pokok dan fungsi membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Perdagangan, Perindustrian :

#### **I. Tugas Pokok**

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur mempunyai tugas pokok membantu Bupati Flores Timur dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral.

#### **II. Fungsi**

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan diatas, menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan bidang perdagangan, perindustrian energy dan sumber daya mineral;
2. Pelaksanaan kabijakan bidang Perdagangan, Perindustrian energy dan sumber daya mineral; 3
3. Pelaksanaan Administrasi Dinas ;
4. Pembinaan, pengoordinasian dan pengendalian urusan perdagangan, perindustrian, energy dan sumber daya mineral;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perdagangan,perindustrian, energy dan sumber daya mineral;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi urusan perlengkapan rumah tangga, kepegawaian dan keuangan serta penyusunan program dan pelaporan lingkup dinas.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
2. penyusunan program dan anggaran;
3. pengelolaan keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah;
4. pengelolaan urusan kepegawaian; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan urusan tata usaha, kearsipan, administrasi kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik daerah serta urusan keuangan.

Dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

1. penatausahaan administrasi perkantoran;

2. pengelolaan dokumen kepegawaian;
3. pengelolaan perlengkapan perkantoran;
4. pengelolaan dan penataan barang milik daerah;
5. pengelolaan dan penatausahaan keuangan;
6. verifikasi dan pembukuan keuangan; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4

Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan urusan Program, Data dan Evaluasi Dinas. Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan penyusunan program, data dan evaluasi;
2. perencanaan program, data dan evaluasi;
3. pelaporan pelaksanaan program, data dan evaluasi; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perindustrian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Perindustrian. Dalam melaksanakan Tugas menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana kerja perindustrian;
2. perumusan kebijakan teknis perindustrian;
3. pelaksanaan program dan kegiatan perindustrian;
4. pengendalian, evaluasi dan pelaporan perindustrian; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Perdagangan. Dalam menjalankan Tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Perdagangan;
- b. perumusan kebijakan teknis perdagangan;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan perdagangan;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan perdagangan; dan

6

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5

Bidang Meterologi dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Meterologi dan Perlindungan Konsumen. Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana kerja meterologi dan perlindungan konsumen;
2. perumusan kebijakan teknis meterologi dan perlindungan konsumen;
3. pelaksanaan program dan kegiatan meterologi dan perlindungan konsumen;
4. pengendalian, evaluasi dan pelaporan meterologi dan perlindungan konsumen; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Jabatan Fungsional dan Pelaksana, selain jabatan struktural pada Dinas terdapat jabatan fungsional dan Pelaksana yang jenis dan jumlahnya ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas ini adalah untuk memberikan gambaran terhadap kontribusi Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan tugas bidang urusan Perdagangan dan Perindustrian. Agar dalam pelaksanaan bidang urusan Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana tertuang dalam rincian tugas dan fungsi, maka faktor-faktor internal dan eksternal telah dipertimbangkan untuk lebih mengoptimalkan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja yang ingin dicapai. Perubahan lingkungan strategis baik dari internal, regional, nasional maupun Global yang begitu dinamis memiliki pengaruh dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur. Faktor-faktor memanfaatkan kekuatan (Strength) dan mengatasi kelemahan (Weakness) dan dari faktor internal agar dapat memanfaatkan peluang (Opportunity) dan dapat mengatasi ancaman (Threat) yang mungkin terjadi. Dengan demikian Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan kewenangan dan mengoptimalkan potensi di bidang urusan Perdagangan dan Perindustrian.

#### I.4 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 67 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat dengan 2 (dua) Sub Bagian; Subag Umum, Keuangan dan Kepegawaian, Subbag Program Data dan Evaluasi, 3 (tiga) Bidang yaitu Bidang Perdagangan, bidang Perindustrian dan Bidang Merologi dan Perlindungan Konsumen serta Kelompok Jabatan Fungsional. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur secara baik dan akuntabel, kualitas Sumber Daya Manusia sangat penting, saat ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur memiliki Jumlah pegawai pada awal tahun 2023 sebanyak 22 orang, mutasi pegawai keluar sebanyak 1(satu) orang, pensiun 2 (dua) orang tugas belajar 1 (satu) orang, pegawai masuk 1 orang, sehingga pada akhir Tahun 2023 jumlah pegawai sebanyak 19 orang, dan 6 (enam) orang tenaga kontrak dengan rincian sbb :

- ASN : 18 orang
- PPPK : 1 orang
- Jumlah : 19 orang

Dibantu oleh tenaga honorer sebanyak 6 orang.

##### a. Kompetensi Pegawai

Gambaran Kompetensi Aparatur dari unsur PNS Organik dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 1

Menurut Tingkat Pendidikan Formal :

No Urt.	Jenis Kelamin	Pendidikan				Jumlah
		SLTA	SARMUD/ DIPLOMA	S1	S2	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Laki-laki	2	2	3	1	10
2.	Perempuan	3	1	5	-	11
	<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>19</b>

Tabel 2

Menurut Golongan / Kepangkatan :

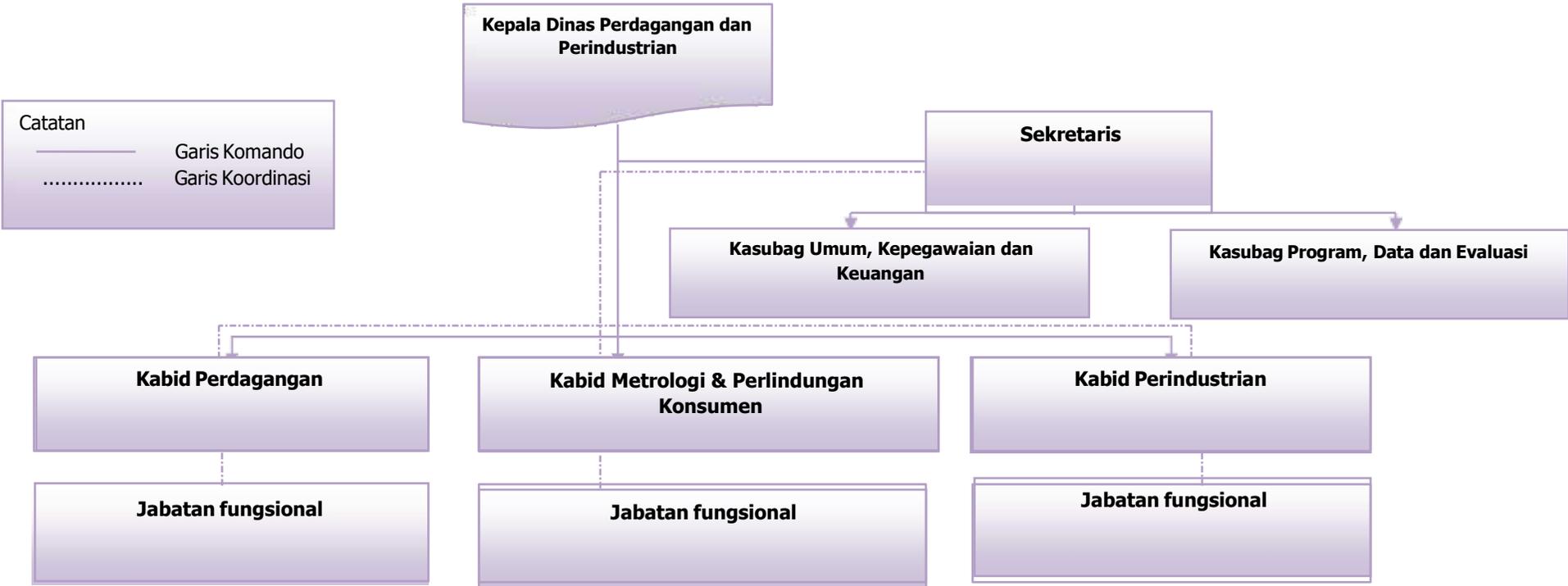
No Urt.	Jenis Kelamin	Golongan / R. Gaji				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Laki-laki	-	-	8	1	9
2.	Perempuan	-	1	7	1	9
	<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>19</b>

Tabel 3

Menurut Pendidikan Penjenjangan :

No	Jenis kelamin	Pim. II	Pim. III	Pim. IV	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1.	Laki-laki	-	2	2	4
2.	Perempuan	-	-	2	2
	<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN FLORES TIMUR



### I.5 Permasalahan dan Isu – Isu Strategis

Identifikasi masalah merupakan tindakan dalam mengobservasi dan menguraikan masalah-masalah yang muncul sehingga dapat diambil rumusan guna mendapatkan solusi yang tepat untuk memperbaiki dan menyelesaikan permasalahan tersebut khususnya penanggulangan di masa yang akan datang. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur, dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum terwujudnya daya saing ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rendahnya Kualitas Produksi, Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya penguatan kelembangan industri</li> <li>Rendahnya kualitas produksi</li> <li>Belum optimalnya promosi dan pemasaran produk unggulandaerah</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Rendahnya Nilai tambah sectorpenyumbang PDRB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan informasi dalam proses produksi</li> <li>Belum tersedianya Sistem dan jaringan pemasaran</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Rendahnya Pengawasan dan Pengendalian harga bahan pokokmelalui aplikasi secara berkala</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya Pengendalian bongkar muat barang</li> <li>Belumnya optimalnya publikasi harga bahan pokok melalui aplikasi</li> </ul>

## Penentuan Isu-Isu Strategis

Kondisi industri kecil dan menengah di Kabupaten Flores Timur, secara umum masih perlu dilakukan peningkatan Meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah. Hal ini menjadi salah satu tugas Pemerintah. Indikator utama peningkatan nilai produksi adalah kemampuan pelaku industri kecil dan menengah memproduksi produk yang mempunyai daya saing dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi dan kekhasan daerah. Berdasarkan analisis atas identifikasi permasalahan pembangunan perdagangan dan perindustrian dirumuskan beberapa isu strategis sebagai berikut:

1. Rendahnya Kualitas produksi, promosi dan pemasaran produk unggulan daerah
2. Belum optimalnya pengembangan agroindustri
3. Rendahnya nilai tambah sector penyumbang PDRB
4. Belum optimalnya pengawasan harga bahan pokok
5. Belum optimalnya perlindungan dan pengamanan konsumen

### I.6 Tujuan Dan Manfaat Lakip

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur di susun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*).

Sesuai dengan Keputusan MenPAN RB No. 29 Th.2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, yang merupakan pedoman pelaksanaan dari Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

- 1) Mendorong Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

- 2) Menjadikan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
- 3) Menjadi masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur

### **I.7 Sistematika Penulisan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ditetapkan sistematika laporan kinerja sebagai berikut :

- **BAB I PENDAHULUAN**  
Berisi uraian mengenai gambaran umum organisasidan sekilas pengantar lainnya
- **BAB II PERENCANAAN KINERJA**  
Berisi ikhtiar beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjajnjian kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja)
- **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**  
Dalam Bab ini diuraikan pencapaian sasaran – sasaran organisasi pelapor, dengan pengungkapan dan penyajian hasil pengukuran kinerja.
- **BAB IV PENUTUP**
- **LAMPIRAN**

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Visi Pembangunan Daerah

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur mendukung visi daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005- 2025 yakni ” **Flores Timur Yang Maju, Sejahtera, Bermartabat dan Berdaya Saing**”, dengan misi pembangunan daerah yakni:

1. Mewujudkan daya saing
2. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
3. Mewujudkan manusia dan masyarakat bermoral dan berbudaya
4. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik

### 2.2. Perencanaan Kinerja

Dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur Tahun 2023- 2026, ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator jangka menengah serta target kinerjanya disajikan sebagai berikut:

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD  
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun Dasar	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026	
	Terwujudnya Daya Saing Ekonomi	Meningkatkan Laju pertumbuhan PDRB sector industry pengolahan	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan (%)	0,33	1,25	1,75	2,15	2,94	
		• Meningkatkan pertumbuhan PDRB	Pertumbuhan PDRB (%)	0,55	4,59	4,61	4,65	4,71	
		• Laju inflasi daerah	Menurunnya Laju Inflasi Daerah	-2,02	0,45	0,45	0,55	0,55	

### **2.3 Indikator Kinerja Utama**

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan mempedomani Indikator Kinerja Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2005- 2025, serta rencana strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur Tahun 2023- 2026.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dimaksud ditetapkan dengan memilih indikator- indikator kinerja yang berfokus pada tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur. Penjelasan tentang Indikator Kinerja Utama tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3. IKU Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	PENJELASAN FORMULA / RUMUS PERHITUNGAN
1	<p><b>Meningkatkan nilai tambah sektor penyumbang PDRB industri pengolahan</b></p> <p>Meningkatkan nilai tambah sektor penyumbang PDRB industri pengolahan</p>	<p>Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (%)</p> <p>Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (%)</p>	Perindustrian	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	<p>BPS : Flotim Dalam angka 2021</p> <p>Laporan Tahunan OPD</p>	$\frac{\text{PDRB}(T+1) - \text{PDRB}(t)}{\text{PDRB}(t)} \times 100\%$ <p>Dimana : (t+1) = Tahun pengamatan PDRB T = Tahun Pengamatan PDRB</p> <p>Jumlah Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan -----x100% Jumlah PDRB</p>
	<p><b>Menurunnya angka inflasi Daerah</b></p> <p>Pengawasan dan pengendalian harga bahan pokok</p>	<p>Laju Inflasi (point)</p> <p>cakupan pengawasan dan pengendalian harga bahan</p>	<p>Perdagangan</p> <p>Perdagangan</p>	<p>Dinas Perdagangan dan Perindustrian</p> <p>Dinas Perdagangan dan Perindustrian</p>	<p>BPS : Flotim Dalam angka 2021</p> <p>Laporan Tahunan OPD</p> <p>BPS : Flotim Dalam angka 2021</p> <p>Laporan Tahunan OPD</p>	$((1 + \Delta\text{Inf}1) + \Delta\text{Inf}2 + \Delta\text{Inf}t) / t - 1$ <p>Dimana :</p> <p><math>\Delta\text{Inf}1</math> : Perubahan inflasi dari nilai tahun Sebelumnya</p> <p>t; Periode Pengamatan Perubahan Nilai inflasi</p> <p>Capaian pengawasan dan pengendalian thn n ----- x 100 % Total Bahan Pokok</p>

**2.4 Rencana Kinerja Tahunan**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdiri atas sasaran strategis, indicator kinerja sasaran strategis dan target kinerja sasaran sebagaimana termuat di dalam dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur Tahun 2023- 2026

Tabel 2,4 Tabel Kinerja Tahunan Disperdagind Kabupaten Flores Timur

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Target 2024</b>
Terwujudnya Daya Saing Ekonomi	Meningkatkan Laju pertumbuhan PDRB sector industry pengolahan	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan (%)	1,75
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan pertumbuhan PDRB</li> </ul>	Pertumbuhan PDRB (%)	4,61
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menurunkan Laju inflasi daerah</li> </ul>	Laju Inflasi Daerah	0,45

## 2.5. Penetapan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penugasan tersebut sebagai wujud komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang ada. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, agar terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja disusun dengan tujuan sebagai : (a) wujud nyata komitmen antara perantara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; (b) tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; (c) dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta pemberian penghargaan dan sanksi; (d) dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan kinerja penerima amanah; (e) dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. Dokumen tersebut berisi indikator kinerja utama beserta targetnya, dimana indikator kinerja tersebut memenuhi kriteriakriteria yang ditetapkan, yaitu spesifik (specific), dapat diukur (measurable), dapat dicapai (attainable), keterkaitan (relevant), berjangka waktu tertentu (time bound), dan dapat dipantau pelaksanaannya. Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

**Tabel 5.1 Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian  
Kabupaten Flores Timur Tahun 2023**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya nilai tambah sector penyumbang PDRB industry pengolahan	Kontribusi sector industry pengolahan terhadap PDRB	1,25 %	12 Bulan
2	Pengawasan dan pengendalian harga bahan pokok dan barang penting	Cakupan pengawasan dan pengendalian harga	100 %	12 Bulan
3	Pengendalian Bongkar Muat Barang	Regulasi bongkar muat barang	1 dok	12 Bulan
4	Penendalian harga dan ketersediaan bahan pokok	Presentase pengendalian bahan pokok	100 %	12 Bulan
5	Publikasi harga bahan pokok melalui aplikasi	Presentase publikasi	100 &	12 Bulan
6	Meningkatnya Standarisasi Perlindungan dan pengaman Konsumen	Persentase Perlindungan dan Pengawasan Konsumen	12 Bulan	12 Bulan
7	Pemetaan Kawasan Industri berbasis potensi daerah	Cakupan Pembinaan Kelompok Pengrajin / IKM	1 Dok	12 Bulan
8	Penguatan Kelembagaan Manajemen dan Pemberdayaan Industri	Presentase IKM yang ditingkatkan kapasitasnya	15 persen	12 Bulan

## 2.6. Alokasi Anggaran

Untuk mencapai sasaran dan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2023, alokasi pendanaan pelaksanaan kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dialokasi dalam APBD Murni Kabupaten Flores Timur pada Tahun 2023 sebesar Rp. 3.394.672.985,- dan pada APBD Perubahan Tahun 2023 sebesar Rp. 2.821.157.212,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.2.778.972.212,- dan Belanja Modal sebesar Rp.42.285.000,-. Anggaran Belanja Langsung tersebut dialokasikan ke dalam 6 Program, 13 kegiatan dan 35 Sub Kegiatan yaitu :

## URUSAN PERDAGANGAN

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota didukung 8 Kegiatan dengan 26 Sub Kegiatan
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan didukung oleh 1 kegiatan dengan 1 Sub Kegiatan;
3. Program Stabilitas harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting didukung oleh 1 Kegiatan dengan 3 Sub Kegiatan;
4. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen didukung 1 Kegiatan dengan 2 Sub Kegiatan;
5. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri didukung 1 Kegiatan dengan 1 Sub Kegiatan

## URUSAN PERINDUSTRIAN

6. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri didukung 1 Kegiatan dengan 2 Sub Kegiatan

Adapun alokasi anggaran berdasarkan program tersebut di atas secara rinci dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

**Tabel 2.6 Alokasi Anggaran Program Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2023**

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota/Kabupaten	Rp 2.386.017.147	8	26
2	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 59.249.425	1	1
3	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting	Rp 109.021.525	1	3
5	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp 79.999.410	1	2
6	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp 24.516.705	1	1
7	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp 162.353.000	1	2
TOTAL		<b>Rp 2.821.157.212</b>	<b>13</b>	<b>35</b>

Perbandingan Pagu Sebelum Perubahan dengan Pagu Setelah Perubahan  
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kabupaten Flores Timur  
Tahun 2023

No	Program	Anggaran	
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.418.061.325	2.386.017.147
2.	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	72.459.840	59.249.425
3.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	97.743.840	109.021.525
4.	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	89.079.490	79.999.410
5.	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	187.429.265	24.516.705
6.	Perencanaan dan pembangunan Industri	529.899.225	162.353.000
<b>Jumlah</b>		<b>3.394.672.985</b>	<b>2.821.157.212</b>

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### 1. CAPAIAN KINERJA ORGANSISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023 diukur dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023.

Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur adalah perwujudan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur Tahun 2003 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Bab ini akan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur Tahun 2023. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur nilai peringkat kinerja dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian Indikator Kinerja} &= \frac{\text{Rp. 2.638.308.912,-}}{\text{Rp. 2.821.157.212,-}} \times 100 \% \\ &= 93,51 \% \end{aligned}$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator maka diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu :

No	Kategori	Nilai Angka	Interprestasi
1.	AA	➤ 85 – 100	Memuaskan
2.	A	➤ 75 – 85	Sangat Baik
3.	B	➤ 65 – 75	Baik
4.	CC	➤ 50 – 65	Cukup Baik
5.	C	➤ 30 – 50	Agak Kurang
6.	D	0 – 30	Kurang

Berdasarkan hasil perhitungan capaian Indikator kinerja menunjukkan nilai 93,51 % rentang nilai berada di antara 85 – 100 menunjukkan interprestasi Memuaskan, sehingga dapat disimpulkan capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur adalah memuaskan.

Dalam tahun 2023 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur menetapkan 5 sasaran strategis yang ingin diwujudkan/dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2023 – 2024 yaitu :

1. Meningkatnya laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan
2. Meningkatnya Pertumbuhan PDRB
3. Menurunnya laju inflasi daerah

Pencapaian sasaran ini tercermin dalam indikator-indikator sasaran beserta target dan realisasinya. Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2023.

Evaluasi Pencapaian Kinerja dengan indikator kerjanya adalah Input, Ouput, dan Outcomes dapat dijelaskan per program sebagai berikut :

#### 1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Dinas Perdagangan dan perindustrian Kabupaten Flores Timur telah melaksanakan seluruh kegiatan hingga akhir tahun 2022. Adapaun seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam mewujudkan sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

##### 1. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

###### 1.1. **Kegiatan** Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

###### **Sub Kegiatan** Peningkatan Sistem jaringan Informasi Perdagangan

Dengan capaian kinerja sbb :

Target : 1 Laporan

Realisasi : 1 Laporan

Capaian Kinerja : 100%

Capaian kinerja dari Kegiatan ini adalah dilakukannya Rapat Koordinasi dan Evaluasi pemanfaatan Tol Laut TA 2022 di Kecamatan Larantuka, maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah mengevaluasi pemanfaatan tol laut tahun 2022, untuk mengetahui permasalahan dan mendapatkan masukan / saran dari peserta rapat (pelaku usaha pengguna jasa tol laut) diharapkan hadirnya tol laut dapat memberikan dampak baik untuk masyarakat dan pelaku logistic sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dari hasil Evaluasi yang dilakukan pemanfaatan tol laut belum optimal karena masih kurangnya sosialisasi kepada pelaku usaha di tingkat Kec/Desa/Kelurahan, sehingga pengguna Tol Laut masih pada para pelaku usaha tingkat menengah ketas.

## 2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

### 2.1. Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

Target : 1 Dokumen

Realisasi : 1 Dokumen

Capaian Kinerja : 100 %

Capaian Kinerja dari Kegiatan ini adalah Dokumen yang dihasilkan dari pelaksanaan :

- kegiatan Pembinaan Pedagang kaki lima di Kecamatan Wulanggitang terhadap 40 PKL dari 148 PKL yang terdata dengan melibatkan Dinas Koperasi UKM, Dinas Perhubungan dan Polsek Kecamatan Wulanggitang. Maksud dan tujuannya pembinaan untuk membina para PKL dan meminimalisir pemasalahan yang diakibatkan oleh PKL agar terjaganya kebersihan, keindahan dan ketertiban, keamanan dan kesehatan lingkungan di Pasar Boru dikarenakan Keberadaan PKL sering menimbulkan berbagai permasalahan seperti penggunaan fasilitas umum untuk berjualan yang mengakibatkan ketidaknyamanan yang dialami para pemakai jalan.
- Pembangian bantuan sarana dagang berupa Payung Jualan kepada PKL yang telah mengikuti Pembinaan PKL pada 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu 40 PKL di Kecamatan Larantuka dan 25 Di Kecamatan Adonara Timur.

Dari hasil pelaksanaan kegiatan ini masih belum maksimal karena kegiatan Pembinaan PKL belum dapat mengakomodir semua PKL yang terdata karena keterbatasan anggaran.

### 3. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

#### 3.1. **Kegiatan** Pelaksanaan Metrologi Legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan

##### **Sub Kegiatan** Pelaksanaan Metrologi Legal berupa tera, tera ulang

Dengan capaian kinerja sbb :

Target	: 300 unit
Realisasi	: 301 Unit UTTp
Capaian Kinerja	: 103, %

Capaian Kinerja dari Pelaksanaan Metrologi Legal berupa tera tera ulang.

Berupa :

- Pelaksanaan sidang tera tera ulang di Kecamatan Larantuka dan Kecamatan Adonara Timur (Waiwerang), bertempat di Pasar Inpres Larantuka, Pasar Lamawalang dan Kantor Xamat Adotim Terhadap 301 peralatan UUTP dari Kecamatan Larantuka, Ile Mandiri, Lewolema, Tanjung Bunga, Titehena Demon Pagong, Wulanggitang, Solor Barat dan Solor Timur, Adonara Barat, Adotim, Adonara, Kelubagolit, Witihama, Ileboleng, Wotan Ulumado. Dan juga tera pada Unit Asphalt Mixing Plan (AMP) Milik PT Sarana Agung Perkasa, PT Bumi Permai Nusantara dan PT Krisindo Sejahtera di Kabupaten Flores Timur, Tera Ulang Pompa Ukur BBM Milik SPBU 01, 02 di Larantuka, SPBU KOMPAK di Waiwerang SPBU 05 Weri Larantuka dan SPBU 06 di Kimak Kamak Adobar.
- MOU antara Pemerintah Kabupaten Flores Timur dengan Pemkab Lembata, Nagekeo untuk melakukan pelayanan siding tera.

Selain pelaksanaan sidang tera anggaran kegiatan ini digunakan juga untuk Biaya Jasa Kalibrasi peralatan standar Metrologi yang dilakukan oleh petugas teknis Penera dari BSML Reg II Yogyakarta . Adapun dari kegiatan ini dapat menghasilkan PAD sebesar Rp. 47.965.000,- dari target Rp. 20.000.000,-

##### **Sub Kegiatan** Pengawasan Penyuluhan Metrologi Legal

Dengan capaian kinerja sbb :

Target	: 100 orng / pelaku usaha
Realisasi	: 80 orang / pelaku usaha
Capaian Kinerja	: 75 %

Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah dilakukan pengawasan terhadap penggunaan peralatan UUTP dan perlengkapannya pada pedagang yang tidak memiliki tanda tera yang sah di Kota Larantuka Sekaligus melakukan penyuluhan langsung kepada pemilik UUTP tentang manfaat dari tera tera ulang.

### 4. Program Stabilisasi Harga Barang dan Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

4.1. **Kegiatan** Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting lainnya di Tingkat Pasar / Kabupaten / Kota

**Sub Kegiatan** Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang

Dengan capaian kinerja sbb :

Target : 1 Laporan

Realisasi : 1 Laporan

Capaian Kinerja : 100 %

Capaian kinerja kegiatan ini adalah Tersedianya Laporan terkait pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan meliputi :

- Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang kebutuhan pokok
- Pendataan ulang pedagang pengguna kios permanent di Pasar Inpres Larantuka
- Mengikuti Rakor Bidang perdagangan Tingkat Provinsi NTT di Kupang.

**Sub Kegiatan** Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan

Dengan capaian kinerja :

Target : 1 Laporan

Realisasi : 1 Laporan

Capaian Kinerja : 100 %

Capaian Kinerja dari kegiatan ini adalah Tersedianya Laporan terkait pelaksanaan kegiatan berupa :

- Pengambilan Data informasi perkembangan harga barang kebutuhan bahan pokok dan barang penting lainnya di Wilayah kabupaten Flores Timur.

**Sub Kegiatan** Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam satu Kabupaten / Kota

Dengan capaian kinerja :

Target : 1 Laporan

Realisasi : 1 Laporan

Capaian Kinerja : 100 %

Capaian Kinerja dari kegiatan ini adalah Tersedianya laporan terkait pelaksanaan kegiatan berupa :

- Melakukan penandatanganan kontrak sewa pakai sarana pasar ( Pasar Larantuka, Pasar Lamawalang, Pasar Boru , Pasar Waiwerang dan Pasar Waiwadan), operasi pasar bersama perum bulog Larantuka (wilayah Solor, Adonara dan Flotim daratan), pemantauan dan pengawasan pasar bersama tim TPID Kab. Flores Timur, Konsultasi dan Koordinasi terkait pengelolaan pasar di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Sikka dan penagihan retribusi dan pelayanan pasar

5. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

5.1. **Kegiatan** Penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota  
**Sub Kegiatan** Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Dengan capaian kinerja sbb :

Target : 1 Dokumen

Realisasi : 1 Dokumen

Capaian Kinerja : 100%

Capaian kinerja kegiatan ini adalah Tersedianya Dokumen Rancangan Awal Naskah akademis RPIK 2025 – 2045 dan lanjutan Penyusunan Dokumen MPIG atas prakarsa dari Kemenkuham NTT Rencana terkait pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan meliputi :

- Pengambilan data data pendukung dengan lokus pada beberapa lokasi yakni Kecamatan Iarantuka ( Kelurahan Waibalun dan Desa Mokantarak), Kecamatan Demon Pagong ( Desa Lewokluwok, Kawalelom Lemuda ) Kec. Tanjung Bunga ( Desa Kolaka), Kecamatan SolSel ( DEsa Sulengwaseng, Knere), Kecamatan Solbar ( Desa Titehena, Lamawalang) Kec. Witihamas ( Desa pledo), Kecamatan Kelubagolit ( Desa Pepakelu, Redonten) Kecamatan Wotan Ulumado ( Desa Samasoge), Kecamatan Ile Mandiri (Dsa Riangkemie), Kecamatan Lewolema (DEsa Bantala) Kecamatan Ilebura (Desa lewotobi) Kecamatan Ile Boleng (DEsa Gayak)
- Melakukan Rapat Rapat Internal OPD dan FDG dengan para pemangku kepoentingan.

5.2. **Sub Kegiatan** Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Dengan capaian kinerja sbb :

Target : 1 Dokumen

Realisasi : 1 Dokumen

Capaian Kinerja : 100 %

Capaian kinerja kegiatan ini adalah Tersedianya Dokumen hasil dari pelaksanaan kegiatan berupa Bantuan Hibah kepada Dekranasda Kabupaten Flores Timur sebesar Rp. 50.000.000,- dan kegiatan sinkronisasi dan evaluasi data IKM di Kabupaten Flores Timur.

6. Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah

6.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

❖ Sub Kegiatan

Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Target : 2 Dokumen

Realisasi : 2 Dokumen

Capaian Kinerja : 100%

Tersedianya dokumen Renja dan Renja Perubahan  
2023

❖ Sub Kegiatan

Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD

Target : 2 Dokumen

Realisasi : 2 Dokumen

Capaian Kinerja : 100%

Tersedianya dokumen RKA 2024 dan RKA  
Perubahan 2023

❖ Sub Kegiatan

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja  
SKPD

Target : 6 Laporan

Realisasi : 6 Laporan

Capaian Kinerja : 100%

Tersedianya Laporan LAKIP, LPPD, LKPJ, PK, PK  
Revisi

❖ Sub Kegiatan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Target : 4 Laporan

Realisasi : 4 Laporan

Capaian Kinerja : 100%

Tersedianya Laporan Evaluasi Renja  
Triwulan I s/d IV, Evaluasi Renstra

## 6.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

❖ Sub Kegiatan

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Target : 22/14 Bulan

Realisasi : 22/14 Bulan

Capaian Kinerja : 100%

Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN

❖ Sub Kegiatan

Pelaksanaan Penatusahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD

Target : 12 Dokumen

Realisasi : 12 Dokumen

Capaian Kinerja : 100%

Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan

❖ Sub Kegiatan

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/  
semesteran SKPD

Target : 2 Laporan  
 Realisasi : 2 Laporan  
 Capaian Kinerja : 100%  
 Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan Triwulan/  
 semesteran SKPD

### 6.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

#### ❖ Sub Kegiatan :

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Target : 2 Laporan  
 Realisasi : 2 Laporan  
 Capaian Kinerja : 100%

Tersedianya laporan hasil pendataan dan Inventarisi barang milik daerah

### 6.4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

#### ❖ Sub Kegiatan :

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Target : 1 Dokumen  
 Realisasi : 1 Dokumen  
 Capaian Kinerja : 100%

Tersedianya laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai

#### ❖ Sub Kegiatan :

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Target : 3 orang  
 Realisasi : 1 orang  
 Capaian Kinerja : 33,33%

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Bagi 1 orang Pegawai

### 6.5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

#### ❖ Sub Kegiatan :

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan Bangunan Kantor

Target : 3 Paket  
 Realisasi : 3 Paket  
 Capaian Kinerja : 100%

Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

#### ❖ Sub Kegiatan :

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Target : 2 Paket  
 Realisasi : 2 Paket

- Capaian Kinerja : 100%  
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- ❖ Sub Kegiatan :  
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    - Target : 1 Paket
    - Realisasi : 1 Paket
    - Capaian Kinerja : 100%  
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor
  - ❖ Sub Kegiatan :  
Penyediaan Logistik Kantor
    - Target : 1 Paket
    - Realisasi : 1 Paket
    - Realisasi : 100%
    - Capaian Kinerja : Tersedianya bahan Logistik kantor.
  - ❖ Sub Kegiatan :  
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - Target : 1 paket
    - Realisasi : 1 paket
    - Capaian Kinerja : 100%  
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
  - ❖ Sub Kegiatan :  
Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan perundang Undangan
    - Target : 1 dokumen
    - Realisasi : 1 dokumen
    - Capaian Kinerja : 100%  
Tersedianya Bahan bacaan (Pos Kupang)
  - ❖ Sub Kegiatan :  
Penyediaan Fasilitas Kunjungan tamu
    - Target : 12 Laporan
    - Realisasi : 12 Laporan
    - Capaian Kinerja : 100 %  
Tersedianya makan dan minum untuk rapat dan tamu
  - ❖ Sub Kegiatan :  
Penyelenggaraan Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
    - Target : 12 Laporan
    - Realisasi : 12 Laporan
    - Capaian Kinerja : 100 %  
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

## 6.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

## ❖ Sub Kegiatan :

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Target : 2 Unit

Realisasi : 2 Unit

Capaian Kinerja : 100%

Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ( 2 unit Leptop)

## ❖ Sub Kegiatan :

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Target : 49 Unit

Realisasi : 49 Unit

Capaian Kinerja : 100%

Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ( 49 unit Gorden)

## 6.7. Penyediaan Jasa penunjang Urusan pemerintah Daerah

## ❖ Sub Kegiatan :

Penyediaan Jasa Surat menyurat

Target : 12 Laporan

Realisasi : 12 Laporan

Capaian Kinerja : 100 %

Tersedianya jasa surat menyurat

## ❖ Sub Kegiatan :

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Target : 12 Laporan

Realisasi : 12 Laporan

Capaian Kinerja : 100 %

Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan

## ❖ Sub Kegiatan :

Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor

Target : 12 Laporan

Realisasi : 12 Laporan

Capaian Kinerja : 100 %`

Tersedianya jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran

## 6.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah

## ❖ Sub Kegiatan :

Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

Target : 7 unit

Realisasi : 7 unit

Capaian Kinerja : 100 %

Kendaraan Dinas yang dilayani perizinannya dan terpeliharanya kendaraan dinas.

❖ Sub Kegiatan :

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya

Target : 1 Unit

Realisasi : 1 Unit

Capaian Kinerja : 100%

Terpeliharanya gedung kantor

❖ Sub Kegiatan :

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya

Target : 28 unit

Realisasi : 28 unit

Capaian Kinerja : 100%

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana gedung kantor

## 2. Analisis Penyebab Keberhasilan / kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan;

Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan terhadap sasaran strategis atau hasil program atau kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Adapun Analisis Kinerja untuk melihat pencapaian per sasaran dari 3 sasaran yang ada dalam renstra beserta hambatan dan kendala yang dihadapi untuk pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dalam tahun 2023 Dinas Perdagangan dan Pertindustrian Kabupaten Flores Timur menetapkan 3 (tiga) sasaran yang ingin diwujudkan/dicapai sesuai dengan Renstra 2023-2026 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur.

Pencapaian 3 sasaran ini tercermin dalam indikator-indikator sasaran beserta target dan realisasinya. Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut

### Sasaran 1. Meningkatnya Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan

Sasaran ini dicapai melalui Program Perencanaan dan pembangunan Industri di dukung oleh kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / kota,

Tabel 3.1

Indikator pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Capaian awal tahun perencanaan	2023		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1	Laju Pertumbuhan PDRB sector Industri Pengolahan	0,33	1,25	11,16	8,93 %

Pada table diatas berdasarkan data statistic dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Flores Timur terlihat pada tahun 2023 Laju Pertumbuhan PDRB sector Industri Pengolahan mengalami peningkatan dengan selisih yang cukup tinggi akan tetapi jika dilihat dari pertumbuhan PDRB Kabupaten Flores Timur tergolong tidak stabil karena setiap tahunnya mengalami naik turun.

#### ➤ Permasalahan yang dihadapi :

Ada beberapa permasalahan mendasar yang menyebabkan pertumbuhan kelompok industry kecil pengolahan belum berkembang dengan baik antara lain belum optimalnya penggunaan teknologi tepat guna dalam proses IKM , sarana dan prasarana promosi dan pemasaran produk industry,

perkembangan sentra industry yang potensial dalam rangka peningkatan efisiensi dan produktivitas yang belum optimal, akan tetapi permasalahan yang paling sering dihadapi adalah permintaan dari desa/kelompok usaha untuk pelaksanaan pendampingan atau permintaan nara sumber namun tidak tersedianya anggaran oleh Dinas dan juga kurangnya SDM Dinas sebagai nara sumber.

- Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang di hadapi dalam pencapaian kinerja sasaran strategis

Beberapa hal yang telah dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan diatas adalah Mengusulkan dukungan pendanaan kepada Pemerintah Daerah sehingga kedepannya dapat dilakukan peningkatan Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri melalui tenaga SDM yang terampil, Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dengan menitikberakan pada IKM dan peran serta masyarakat dalam tercapainya pelayanan teknologi industri,

## Sasaran 2. Pertumbuhan PDRB

Sasaran ini dicapai melalui Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, didukung oleh kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan, Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, didukung oleh kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam Negeri.

Tabel 3.2

Indikator pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Kondisi awal tahun perencanaan	2023		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1	Pertumbuhan PDRB	0,55	4,59	3,15	0,69 %

Pada table diatas berdasarkan data statistic dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Flores Timur terlihat pada tahun 2023 Pertumbuhan PDRB tidak mencapai target yang telah ditetapkan dapat disimpulkan karena beberapa Produk Domestik Regional Bruto memiliki kontribusi yang signifikan yakni sector pertanian, perkebunan dan perikanan serta sector perdagangan bebas maka terdapat pengaruh yang signifikan antara PDRB dengan pertumbuhan ekonomi.

- Faktor yang mempengaruhi dalam pencapaian sasaran strategis  
Pada dasarnya dikarenakan rendahnya fiscal/keuangan daerah yang diakibatkan oleh beberapa factor seperti penurunan / rendahnya PAD, rendahnya tabungan atau kredit perbankan rendahnya belanja daerah pada sector pendukung PDRB,
- Upaya yang perlu dilakukan dalam pencapaian kinerja sasaran strategis diantaranya
  - Mendorong upaya optimalisasi semua potensi penerimaan daerah melalui optimalisasi sector-sektor yang memungkinkan peningkatan PAD
  - Mendorong kesadaran masyarakat untuk berani memanfaatkan jasa perbankan untuk pengembangan usaha mikro
  - Pemerintah harus dapat mendorong belanja daerah yang lebih mengarah pada sector yang berkontribusi lebih bagi pertumbuhan PDRB daerah (sector pertanian, perkebunanm kelautan perikanan, Lingkungan hidup dan Koperasi)

### Sasaran 3. Menurunkan Laju Inflasi Daerah

Sasaran ini dicapai melalui Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, dan ditunjang oleh kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Pasar Kabupaten Kota. Indikator sasaeen ini dapat terlihat pada Tabel

Tabel 3.3  
Indikator Sasaran Kinerja

No	Indikator Kinerja	Capaian awal tahun percanaan	2023		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1	Laju Inflasi Daerah	3,12	0,45	3,33	7,4 %

Pada table diatas berdasarkan data statistic dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Flores Timur terlihat pada tahun 2023 Laju Inflasi Daerah melebihi dari target yang ditetapkan akan berdampak pada naiknya harga pasar sedangkan penghasilan masyarakat tidak berubah, sehingga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

- Hambatan / kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis
  - Tingkat inflasi yang meningkat bisa dikaitkan dengan kondisi perekonomian nasional maupun daerah , hal ini dapat diartikan bahwa ekonomi mengalami kelebihan permintaan atas produk yang melebihi kapasitas penawaran produksinya sehingga harga semua jenis produk cenderung mengalami kenaikan
- Upaya yang perlu dilakukan dalam pencapaian kinerja sasaran strategis
  - Mengaktifkan Tim Pengendali Inflasi Daerah pada tingkat Provinsi dan Kabupaten agar dapat bersinergi dan konsiten dalam melaksanakan tugas dan fungsi
  - Mengaktifkan satgas pangan di daerah yang bertugas melaporkan harga dan ketersediaan komoditas kepada Pemerintah
  - Melakukan gerakan tanam pangan cepat panen
  - Intensifkan jaringan pengaman social
  - Menjaga Distribusi bahan pangan/stabilisasi harga



Realisasi Anggaran dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2023 dapat dilihat pada table berikut :

**Realisasi Anggaran**

Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/sub. Kegiatan	Target		Realisasi Capaian		Sisa		Tingkat Capaian (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7	
	<b>DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN</b>			<b>2.821.157.212</b>		<b>2.638.308.939</b>		<b>182.848.273</b>		94
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100	<b>2.386.017.147</b>	100	<b>2.218.157.224</b>	-	<b>167.859.923</b>	100	93
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100		100		-	-	100	
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100		100		-	-	100	
		Tingkat pelayanan Administrasi Perkantoran(%)	100		100		-	-	100	
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja (%)</b>	100	67.726.080	100	67.335.100	-	<b>390.980</b>	100	99
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah ( dok )	2	43.237.500	2	42.896.200	-	<b>341.300</b>	100	99
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD(dok)	2	6.989.620	2	6.963.400	-	<b>26.220</b>	100	100

**LAKIP 2023**

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (laporan)	6	9.759.280	6	9.747.000	-	<b>12.280</b>	100	100
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>		<b>5</b>		<b>6</b>		<b>7</b>	
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah(laporan)	4	7.739.680	4	7.728.500	-	<b>11.180</b>	100	100
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase Pelaporan Keuangan ( % )</b>	100	1.816.521.565	100	1.665.430.574	-	<b>151.090.991</b>	100	92
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang/bulan)	23/14	1.755.621.645	23/14	1.604.631.074	-	<b>150.990.571</b>	100	91
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD (dok)	12	45.900.000	12	45.900.000	-	-	100	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD(laporan)	2	14.999.920	2	14.899.500	-	<b>100.420</b>	100	99
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase Administrasi dan Pelaporan BMD ( % )</b>	100	9.999.660	100	9.979.600	-	<b>20.060</b>	100	100
	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD(laporan)	2	9.999.660	2	9.979.600	-	<b>20.060</b>	100	100

*LAKIP 2023*

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	12	21.979.830	12	21.966.450	-	13.380	100	100
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai(dokumen)	1	7.499.830	1	7.486.450	-	13.380	100	100
1	2	3	4		5		6		7	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan(orang)	3	14.480.000	1	14.480.000	2	-	33	100
	Administrasi Umum perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100	188.663.484	100	186.543.500	-	2.119.984	100	99
	Penyediaan Komponen Instalasi /Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan(paket)	3	1.993.659	3	1.719.000	-	274.659	100	86
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan (paket)	2	19.997.075	2	19.933.500	-	63.575	100	100
	Penyediaan peralatan rumah tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan(paket)	1	7.496.050	1	7.494.000	-	2.050	100	100
	Penyediaan Bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan(paket)	1	31.996.700	1	31.986.000	-	10.700	100	100
	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan(paket)	1	25.000.000	1	25.000.000	-	-	100	100

*LAKIP 2023*

	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang- undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (dokumen)	1	900.000	1	900.000	-	-	100	100
	Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu	jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu(laporan)	12	15.000.000	12	13.351.000	-	<b>1.649.000</b>	100	89
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD(laporan)	12	86.280.000	12	86.160.000	-	<b>120.000</b>	100	100
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>				
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)</b>	84	44.285.000	84	42.305.000	-	<b>1.980.000</b>	100	96
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang Disediakan (Unit)	2	29.435.000	2	27.458.000	-	<b>1.977.000</b>	100	93
	Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan(unit)	49	14.850.000	49	14.847.000	-	<b>3.000</b>	100	100
	<b>Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)</b>	100	162.304.000	100	153.730.500	-	<b>8.573.500</b>	100	95
	Penyediaan jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat - menyurat(laporan)	12	2.000.000	12	961.000	-	<b>1.039.000</b>	100	48
	Penyediaan jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)	12	32.304.000	12	31.169.500	-	<b>1.134.500</b>	100	96
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan(laporan)	12	128.000.000	12	121.600.000	-	<b>6.400.000</b>	100	95
	<b>Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)</b>	100	74.537.528	100	70.866.500	-	<b>3.671.028</b>	100	95

**LAKIP 2023**

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang dipelihara yang dibayar pajak dan perizinannya(unit)	7	28.189.178	7	26.278.000	-	<b>1.911.178</b>	100	93
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangun lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)	1	30.998.350	1	29.387.500	-	<b>1.610.850</b>	100	95
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi(unit)	28	15.350.000	28	15.201.000	-	<b>149.000</b>	100	99
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>				
	<b>URUSAN PERDAGANGAN</b>			272.787.065		262.324.215	-	<b>10.462.850</b>		96
Meningkatnya Pertumbuhan PDRB	<b>Program peningkatan sarana distribusi perdagangan</b>	<b>Cakupan sarana distribusi perdagangan</b>	36,11	59.249.425	36,11	59.014.365	-	<b>235.060</b>	100	100
	<b>Pembinaan terhadap pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya</b>	<b>Terbinanya pengelolaan sarana distribusi perdagangan (pasar)</b>	1	59.249.425	1	59.014.365	-	<b>235.060</b>	100	100
	Pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan (Dokumen)	1	59.249.425	1	59.014.365	-	<b>235.060</b>	100	100
Menurunnya Laju inflasi daerah	<b>Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan harga barang penting</b>	<b>Terkendalinya harga barang (laporan)</b>	19	109.021.525	19	100.503.825	-	<b>8.517.700</b>	100	92
	<b>Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten / kota</b>	<b>Terkendalinya harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten / kota(laporan)</b>	12	109.021.525	12	100.503.825	-	<b>8.517.700</b>	100	92
	Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten / kota	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten / kota(laporan)	1	18.499.720	1	18.078.700	-	<b>421.020</b>	100	98

*LAKIP 2023*

	Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan(laporan)	1	17.499.610	1	14.934.250	-	<b>2.565.360</b>	100	85
	Pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten / kota	Jumlah laporan Pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten / kota(Laporan)	1	73.022.195	1	67.490.875	-	<b>5.531.320</b>	100	92
	<b>Program Standarisasi dan perlindungan konsumen</b>	<b>Persentasi perlindungan dan pengamanan konsumen(%)</b>	38,67	79.999.410	38,67	78.293.500	-	<b>1.705.910</b>	100	98
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>		<b>5</b>		<b>6</b>		<b>7</b>	
	<b>Pelaksanaan metrologi legal berupa tera tera ulang dan pengawasan</b>	<b>Jumlah peralatan UTTP dan Pelaku usaha yang diawasi(unit)</b>	945	79.999.410	945	78.293.500	-	<b>1.705.910</b>	100	98
	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera tera ulang	jumlah Alat Ukur, Alat Takar , Alat Timbang, dn Alat perlengkapan Ditera ulang(unit)	300	69.674.410	301	67.968.500	(1)	<b>1.705.910</b>	100	98
	Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina(orang)	100	10.325.000	90	10.325.000	10	-	90	100
Meningkatnya Pertumbuhan PDRB	<b>Program Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri</b>	<b>Cakupan UMKM yang difasilitasi (%)</b>	<b>13,64</b>	24.516.705	<b>13,64</b>	24.512.525	-	<b>4.180</b>	100	100
	<b>Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri</b>	<b>Jumlah UMKM yang berpartisipasi dalam kegiatan promosi Produk dalam negeri</b>	32	24.516.705	32	24.512.525	-	<b>4.180</b>	100	100
	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Jumlah data dan informasi sistem dan jaringan informasi perdagangan (Dokumen)	1	24.516.705	1	24.512.525	-	<b>4.180</b>	100	100
<b>URUSAN PERINDUSTRIAN</b>				162.353.000		157.827.500	-	<b>4.525.500</b>		97

*LAKIP 2023*

Meningkatnya Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	<b>Program Perencanaan dan pembangunan industri</b>	<b>Cakupan industri skala kecil dan menengah yang mengolah hasil pertanian(%)</b>	60,61	162.353.000	60,61	157.827.500	-	<b>4.525.500</b>	100	97
	<b>Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/kota</b>	<b>Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi rencana pembagunan industri Kabupaten/Kota(Dokumen)</b>	12	162.353.000	12	157.827.500	-	<b>4.525.500</b>	100	97
	Penyusunan rencana pembagunan industri Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Rencana pembagunan industri (dok)	1	102.352.925	1	97.827.525	-	<b>4.525.400</b>	100	96
	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat(dok)	1	60.000.075	1	59.999.975	-	<b>100</b>	100	100

## BAB IV

## PENUTUP

**4.1 Kesimpulan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan instrumen dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dan merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur.

Laporan kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 merupakan gambaran kinerja dari seluruh unit kerja di Dinas Perdagangan dan Perindustrian termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan selama tahun 2023. Dalam rencana kinerja Tahun 2022 ditetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja. Hasil capaian kinerja menunjukkan, 2 (dua) indikator belum mencapai target dan 1 (satu) indikator kinerja melampaui target kinerja.

**4.2 Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penilaian terhadap capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Tahun 2022 (*Hasil Evaluasi Inspektorat Daerah atas Implementasi SAKIP Disperdagin Tahun 2022*), dalam upaya meningkatkan capaian kinerja, antara lain :

- Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja pegawai secara berjenjang mulai dari indikator kinerja eselon II, eselon III, eselon IV dan/atau Koordinator hingga capaian kinerja level staf pelaksana;
- meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi internal untuk perbaikan

dimasa yang akan datang;

- melengkapi penjelasan serta analisa atas keberhasilan/kegagalan atas capaian kinerja Dinas.

#### 4.3 Tindak Lanjut

Kami menyadari bahwa kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur ini masih belum sempurna, untuk itu pada Tahun 2024 ini kami berupaya untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan manajemen kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan melakukan :

- Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang perdagangan dan perindustrian;
- Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok perlu ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan;
- Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama yang lebih intensif dengan berbagai pihak/instansi,
- Memberikan kemudahan bagi aparatur untuk meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan.
- Melanjutkan pemberian Reward bagi unit kerja yang memiliki kinerja keuangan baik (pencapaian target retribusi, kesesuaian penyerapan anggaran kas/realisasi tertinggi).

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) tahun 2022 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur ini dibuat, demi kesempurnaan laporan ini, maka segala saran dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi terwujudnya visi Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005- 2025 yakni ” **Flores Timur Yang Maju, Sejahtera, Bermartabat dan Berdaya Saing**”.

Larantuka, Januari 2024

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Kabupaten Flores Timur

Siprianus Sina Ritan, S.Sos.M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19701231 199003 1 056